

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK DARI MAHASISWA FISIP
UMB GUNA MEMBANGUN BUDAYA DEMOKRATIS**



SKRIPSI

DI SUSUN OLEH:

M. HENDRAWAN
NPM: 2069201032

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

TAHUN AJARAN 2025/2026

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK BAGI MAHASISWA FISIPOL
UMB GUNA MEMBANGUN BUDAYA DEMOKRATIS**



Disusun Oleh: M.Hendrawan

NPM 2069201032

Pembimbing

Dosen Pembimbing : Dr. Susiyanto M.Si

PRAKATA

Segala puji bagi Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyusun proposal skripsi dengan judul “Implementasi Pendidikan Politik Bagi Mahasiswa Fisipol Umb Guna Membangun Budaya Demokratis.”

Ada pun penyusunan proposal skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat penyusunan skripsi program studi Sosiologi pada program S1 di universitas muhammadiyah Bengkulu. Dan selanjutnya proposal ini sebagai bahan pertimbangan pihak terkait untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu tahap siding skripsi

Di sini penulis menyadari masih banyak nya kekurangan dalam penyusunan proposal skripsi ini oleh karna itu bimbingan dan arahan dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi hasil penelitian yang lebih baik.

Bengkulu, 10 Maret 2026



M. Hendrawan

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan kemudahan yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta, **Misbah** dan **Zubaida**, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti dalam setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih atas segala perjuangan dan cinta yang tidak pernah putus.

Kepada kakak perempuan penulis, **Eka Juita Hidayani** dan **Desti Kurnia Sari**, serta adik penulis **M. Hendriyadi**, yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta doa dalam perjalanan menyelesaikan pendidikan ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada **Kepala Program Studi Sosiologi** serta seluruh **Dosen Program Studi Sosiologi Universitas Muhammadiyah Bengkulu** yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta pengalaman berharga selama masa perkuliahan.

Terima kasih juga penulis persembahkan kepada teman-teman seperjuangan:

Algamiyanda, Rhizky Pratama Hardiansyah, Muhammad Fawwaz Komena, Rhiko dan **Jhamiko** yang telah menjadi bagian dari perjalanan, diskusi, perjuangan, serta saling memberikan dukungan hingga tahap ini.

Serta kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan dan bagi siapa saja yang membacanya.

MOTTO

"Jadikan Tiap orang Itu Guru dan Jadikan Tiap Tempat Itu Sekolah." (Ki Hajar Dewantara)

"Jangan takut berjalan lambat, takutlah jika hanya diam di tempat."

"Perjuangan tidak selalu tentang kemenangan, tetapi tentang keberanian untuk tetap melangkah."



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Hendrawan
NPM : 2069201032
Program Studi : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“Implementasi Pendidikan Politik Bagi Mahasiswa FISIPOL UMB Guna Membangun Budaya Demokratis”

adalah benar-benar hasil karya penelitian saya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiasi atau menyalin karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah dirujuk dan disebutkan sumbernya secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau terdapat pelanggaran terhadap etika ilmiah, maka saya bersedia menerima segala konsekuensi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di **Universitas Muhammadiyah Bengkulu**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.

Bengkulu, 10 Maret 2026

Yang membuat pernyataan,


M. Hendrawan
NPM: 2069201032

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul "IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK, DARI MAHASISWA FISIPOL UMB GUNA MEMBANGUN BUDAYA DEMOKRATIS"

Hari/Tanggal: 10 Maret 2026

Jam: 13.00-14.30 WIB

Tempat: Gedung Sosiologi

Ketua Penguji

Dr. Susiyanto, M.Si
NIDN : 0230017001

Penguji 1

Penguji 2

Linda Safitra, M.Si
NIDN : 0222118401

Lesti Heriyanti, M.A
NIDN : 0206018101

Mengesahkan

Dekan

Widiana Kurniawati, M.Si
NIDN : 07040778

RINGKASAN

Penelitian ini berjudul **“Implementasi Pendidikan Politik Bagi Mahasiswa FISIPOL UMB Guna Membangun Budaya Demokratis.”** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pendidikan politik dalam membentuk kesadaran politik mahasiswa sebagai generasi muda yang memiliki peran strategis dalam kehidupan demokrasi. Mahasiswa tidak hanya dituntut memahami konsep politik secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sosial dan organisasi di lingkungan kampus.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pendidikan politik di kalangan mahasiswa FISIPOL Universitas Muhammadiyah Bengkulu, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam upaya membangun budaya demokratis di lingkungan mahasiswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif dengan metode deskriptif**, dengan teknik pengumpulan data melalui **wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi**. Informan dalam penelitian ini terdiri dari mahasiswa FISIPOL yang aktif dalam kegiatan akademik, organisasi mahasiswa (ORMAWA), dan organisasi kepemudaan internal Muhammadiyah (IMM).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendidikan politik di FISIPOL UMB berlangsung melalui dua jalur utama, yaitu jalur **akademik dan non-akademik**. Pada jalur akademik, pendidikan politik diberikan melalui proses perkuliahan, diskusi ilmiah, dan seminar yang mengaitkan teori politik dengan kondisi sosial-politik aktual. Sementara itu, pada jalur non-akademik, pendidikan politik diwujudkan melalui aktivitas organisasi mahasiswa seperti BEM dan DPM serta kegiatan kaderisasi di IMM yang memberikan pengalaman langsung dalam praktik demokrasi, seperti musyawarah, pengambilan keputusan, dan penyampaian aspirasi.

Jika dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial **Peter L. Berger**, proses pembentukan budaya demokratis mahasiswa terjadi melalui tiga tahapan, yaitu **eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi**. Eksternalisasi terlihat ketika nilai-nilai demokrasi diperkenalkan melalui kegiatan akademik dan organisasi. Objektivasi terjadi ketika nilai-nilai tersebut menjadi kebiasaan dan norma dalam kehidupan mahasiswa di kampus. Selanjutnya, internalisasi terjadi ketika mahasiswa menyerap nilai demokrasi tersebut ke dalam kesadaran diri sehingga membentuk sikap kritis, partisipatif, dan bertanggung jawab.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan dalam implementasi pendidikan politik, antara lain masih kurangnya diskusi interaktif dalam perkuliahan, dinamika organisasi yang kadang dipengaruhi oleh ego personal, serta belum meratanya internalisasi nilai demokrasi di kalangan mahasiswa.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik di FISIPOL UMB memiliki peran penting dalam membangun budaya demokratis mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan metode pembelajaran yang lebih partisipatif serta pengembangan ruang-ruang diskusi dan organisasi yang mampu mendorong mahasiswa untuk lebih aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.

Kata kunci: pendidikan politik, mahasiswa, budaya demokratis, FISIPOL UMB.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat **Allah SWT** yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul **“Implementasi Pendidikan Politik Bagi Mahasiswa FISIPOL UMB Guna Membangun Budaya Demokratis”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada **Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu**.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Allah SWT**, yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, serta kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. **Kepala Program Studi Sosiologi** serta seluruh **Dosen Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu**, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, serta pengalaman yang sangat berharga selama masa perkuliahan.
3. Kedua orang tua tercinta, **Misbah** dan **Zubaida**, yang selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta semangat yang tiada henti kepada penulis.
4. Kakak perempuan penulis, **Eka Juita Hidayani** dan **Desti Kurnia Sari**, serta adik penulis **M. Hendriyadi**, yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan, **Algamiyanda**, **Rhizky Pratama Hardiansyah**, dan **Muhammad Fawwaz Komena**, yang telah memberikan dukungan, kebersamaan, serta semangat selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang sosiologi.

Bengkulu, 10 Maret 2026

Penulis

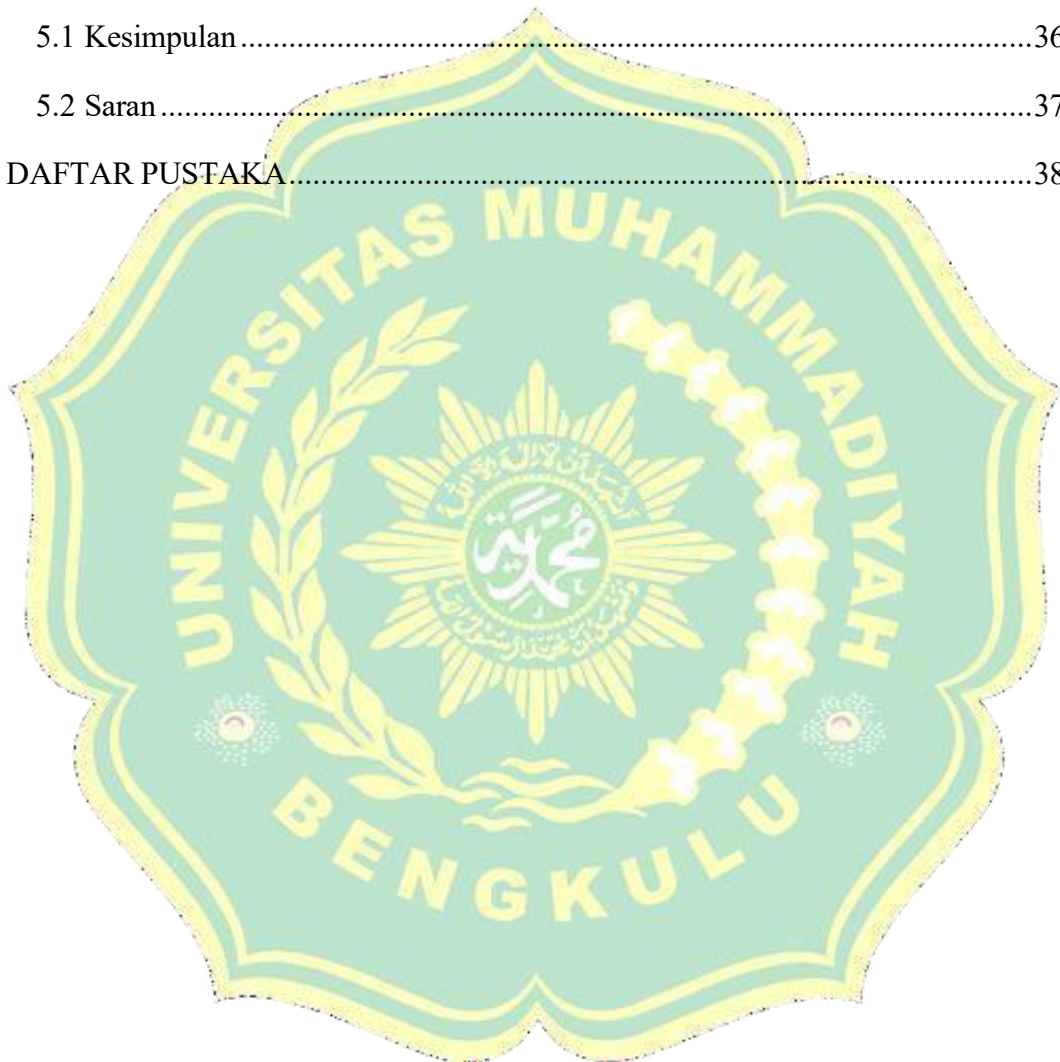
M. Hendrawan

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
RINGKASAN	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II	6
TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Penelitian Terdahulu	6
2.2 Kerangka Konsep dan Landasan Teori	10
2.2.1 Implementasi	11
2.2.2 Pengertian Mahasiswa	12
2.2.3 Pendidikan Politik	13
2.2.3 Demokrasi	16
2.2.4 Landasan Teori	17

2.2.4.1. Teori Peter L. Berger.....	17
2.2.4.2 Keterkaitan dengan Penelitian.....	18
2.2.5 Kerangka Berpikir.....	19
.....	20
BAB III.....	21
METODE PENELITIAN	21
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian	21
3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian	21
3.3 Fokus Penelitian.....	22
3.4 Sumber Data.....	23
3.5 Penentuan Informasi Informan Penelitian.....	23
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.7 Keabsahan Data	25
3.8 Analisis Data.....	25
BAB IV.....	27
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	27
4.2 Hasil Penelitian	29
1. Mahasiswa FISIP (Ruang Perkuliahan).....	29
2. Mahasiswa ORMAWA (BEM & DPM FISIPOL)	29
3. Kader IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah)	30
Kesimpulan	31
4.3 Pembahasan	31
1. Eksternalisasi: Pendidikan Politik sebagai Ekspresi Nilai Demokrasi	32
2. Objektivasi: Pendidikan Politik Menjadi Kenyataan Sosial.....	33

3. Internalisasi: Nilai Demokrasi Menjadi Bagian Identitas Mahasiswa.....	33
4. Komparasi Hasil Penelitian dan Teori Konstruksi Sosial Berger.....	34
5. Implikasi Penelitian	34
BAB V	36
PENUTUP	36
5.1 Kesimpulan	36
5.2 Saran	37
DAFTAR PUSTAKA	38



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Generasi muda memiliki posisi dan peran yang sangat vital dalam kehidupan kebangsaan Indonesia. Hal ini didasarkan pada peran pemuda seperti yang dimuat dalam UU RI No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan yang berbunyi pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. (Sanusi & Darmawan, 2016). Pada dasarnya, pendidikan politik merupakan pendidikan bagi Masyarakat untuk meningkatkan kesadaran bagaimana seharusnya berbangsa dan bernegara yang benar dan memberikan sumbangsih pemikiran untuk berperan aktif dalam Pembangunan.(Wawan Patriansyah et al., 2024)

Pendidikan adalah suatu upaya mengubah sikap dan perilaku sesuai dengan apa yang diharapkan dan diinginkan, yang pelaksanaannya harus dilakukan secara terorganisir, berencana dan berlangsung terus menerus kearah pembinaan manusia menjadi insan paripurna, dewasa dan berbudaya yang dilandasi oleh nilai-nilai budaya dan ideologi dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Pendidikan harus dilakukan secara terus menerus, karena pendidikan bukanlah proses yang terjadi disekolah dan kampus saja, namun juga diluar sekolah dan kampus, yakni dilingkungan pekerjaan dan pemukiman termasuk didalamnya pada lingkungan keluarga. Politik berkenaan dengan negara, termasuk didalamnya soal kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan serta pendistribusian dan pengalokasian nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat(Prayugo & Prayitno, 2022).

Minimnya literasi politik, penyebaran informasi yang bias, serta rendahnya kesadaran kritis warga negara terhadap hak dan kewajiban politiknya menjadi tantangan besar dalam proses konsolidasi demokrasi. Dalam konteks ini, pendidikan politik hadir sebagai instrumen penting untuk membentuk masyarakat yang sadar akan peran dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari sistem demokrasi. Pendidikan politik tidak hanya berfungsi untuk memberikan

pengetahuan tentang sistem pemerintahan, tetapi juga membentuk sikap toleran, menghargai perbedaan, serta mendorong keterlibatan aktif dalam proses politik secara damai dan konstruktif (Amanda et al., 2025).

Pendidikan politik merupakan salah satu aspek penting dalam pembentukan karakter mahasiswa sebagai agen perubahan sosial dan politik. Di Indonesia, kesadaran politik di kalangan mahasiswa masih beragam, meskipun mahasiswa dianggap sebagai kelompok yang memiliki peran signifikan dalam perkembangan demokrasi negara. FISIPOL UMB, sebagai salah satu fakultas yang mendalami ilmu sosial dan politik, memiliki potensi besar dalam mendidik mahasiswanya untuk menjadi warga negara yang aktif dan memiliki kesadaran politik yang tinggi. Namun, tantangan dalam mewujudkan budaya demokratis di kalangan mahasiswa FISIPOL UMB masih perlu diteliti lebih lanjut. Dengan mengimplementasikan pendidikan politik yang tepat, mahasiswa dapat dibimbing untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang demokrasi dan sistem politik yang berlaku. Politik dan pendidikan politik dan pendidikan saling terkait karena pendidikan merupakan instrumen yang kuat untuk membentuk sikap, pengetahuan, dan nilai-nilai politik individu dan masyarakat. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk warga negara yang berpikiran kritis, memiliki pengetahuan politik yang memadai, dan memahami sistem politik yang mereka jalani. Pendidikan politik juga berkontribusi pada partisipasi politik yang lebih aktif dan demokratis. Kekuasaan dalam pendidikan kekuasaan memainkan peran penting dalam pendidikan, karena kontrol atas pendidikan memberi pengaruh besar pada kepemilikan pengetahuan, nilai-nilai, dan pembentukan identitas. (Azmi et al., 2023).

Dalam meningkatkan semangat demokrasi generasi muda tentunya tidak semudah yang dibayangkan. Hal tersebut dikarenakan generasi muda saat ini cenderung cuek, acuh, dan tidak peduli terhadap proses politik atau perkembangan demokrasi di negara ini. Peran pemerintah juga dirasa masih kurang di dalam meningkatkan semangat demokrasi pada generasi muda. Faktor tersebut menjadi permasalahan yang cukup serius dan harus segera ditangani. Mengingat masih

rendahnya semangat demokrasi serta kesadaran generasi muda terhadap haknya sebagai warga negara. Generasi muda saat ini hanya cenderung aktif dalam perkembangan politik dalam negeri namun kepedulian terhadap perkembangan politik itu hanya sebatas di media sosial saja dan tidak disertai dengan sebuah tindakan. Hal tersebut membuktikan bahwa semangat generasi muda saat ini hanya berada di permukaan saja, belum ada semangat yang besar untuk terlibat dalam pelaksanaan demokrasi di negeri ini. Penanaman nilai-nilai luhur kepada generasi muda menjadi suatu keniscayaan, mengingat posisi dan fungsi generasi muda yang begitu vital dalam mencapai cita-cita dan harapan bangsa. Apalagi saat ini Indonesia sedang bersiap menghadapi bonus demografi dengan jumlah penduduk yang besar tergolong masih muda (Anggraeni et al., 2021). Pendidikan Politik yang diselenggarakan oleh Bakesbangpol merupakan sarana dalam membentuk karakter kepemimpinan dan semangat demokrasi dalam politik pada generasi muda. Bila kita melihat potensi yang dimiliki oleh generasi muda, tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan politik ini sangat penting untuk dilaksanakan dan disampaikan sejak dini serta dipahami oleh masyarakat Indonesia terutama generasi muda agar nantinya rakyat Indonesia tidak menjadi objek politik saja namun berperan sebagai subjek politik. Dengan dilaksanakannya pendidikan politik ini, diharapkan generasi muda menjadi “melek politik” dan rakyat akan sadar akan hak dan kewajibannya, kritis, sadar hukum, aktif, dan kreatif serta konstruktif (Alfianda, 2023).

Di alam demokrasi sekarang, pendidikan politik diperlukan karena tuntutan-tuntutan demokrasi itu sendiri. Sebab demokrasi memunculkan banyak ketidakstabilan, namun juga memberikan kemungkinan-kemungkinan baru serta harapan baru yang menyenangkan. Pendidikan politik itu tidak hanya ditujukan perubahan sikap-sikap politik perorangan saja, akan tetapi juga untuk mendukung usaha-usaha untuk memperbaharui dan mendinamisir institusi-institusi kemasyarakatan dan lembaga-lembaga politiknya. Dengan sengaja bangsa kita memilih bentuk demokrasi sebagai wujud pemerintahan dan sebagai asas dasar bagi penataan pemerintahan, karena demokrasi diharapkan memberikan jaminan

berupa kebebasan manusia untuk mempertanggungjawabkan kehidupannya sendiri. Demokrasi tidak hanya melindungi kebebasan pribadi warganegara melalui UUD, undang-undang dan hukum-hukum formalnya saja, akan tetapi juga menjamin pelaksanaan hak-hak asasi manusia yang menyangkut dimensi publik dan tanggungjawab etisnya.(Sukarno, 2011)

penting untuk menegaskan bahwa pendidikan politik bukan sekadar wacana teoritis, melainkan sebuah kebutuhan mendesak dalam membentuk generasi muda yang sadar, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pendidikan politik yang terarah dan kontekstual, khususnya di lingkungan akademik seperti FISIPOL UMB, mahasiswa dapat didorong untuk menjadi agen perubahan yang tidak hanya memahami dinamika politik, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam membangun tatanan demokrasi yang sehat dan berkeadilan.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan utama, seperti:

- Bagaimana implementasi pendidikan politik di kalangan mahasiswa FISIPOL UMB?
- Apa saja tantangan yang dihadapi dalam membangun budaya demokratis melalui pendidikan politik di FISIPOL UMB?
- Bagaimana teori rekonstruksi sosial oleh Peter L. Berger dan teori struktural fungsional dari Robert K. Merton dapat diterapkan dalam konteks ini?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pendidikan politik yang diterapkan di FISIPOL UMB dapat membantu mahasiswa memahami dan mengembangkan budaya demokratis. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan

untuk menganalisis bagaimana kedua teori tersebut dapat memberikan perspektif baru dalam pengembangan pendidikan politik di perguruan tinggi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pendidikan politik di kalangan mahasiswa, serta meningkatkan pemahaman tentang pentingnya budaya demokratis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pihak kampus dalam merancang kurikulum pendidikan politik yang lebih efektif.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Setelah melihat beberapa literatur yang ada di berbagai laman dan tempat dalam kajian pustaka ini penulis melihat ada beberapa penelitian serupa atau penelitian sebelumnya yang relevan dan dapat menjadi acuan peneliti untuk mengembangkan penelitian, antara lain :

1. Sanusi dan Darmawan (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Sanusi dan Darmawan berjudul *"Implementasi Pendidikan Politik dalam Membentuk Karakter Kepemimpinan Lintas Budaya pada Generasi Muda"*. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan objek organisasi kepemudaan, yaitu Gerakan Pemuda Ansor di Jawa Barat. Fokus utama penelitian ini adalah melihat bagaimana pendidikan politik dapat membentuk karakter kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila di kalangan pemuda. Dalam penelitian ini, teori sosiologi secara eksplisit tidak banyak digunakan, melainkan lebih banyak mengandalkan nilai-nilai normatif bangsa Indonesia sebagai kerangka acuan. Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada perhatian terhadap peranan pendidikan politik dalam membentuk karakter dan meningkatkan kesadaran politik generasi muda. Namun, perbedaannya, penelitian Sanusi dan Darmawan berfokus pada organisasi kepemudaan di masyarakat luas, sementara penelitian ini berfokus khusus pada mahasiswa di lingkungan kampus FISIPOL UMB dengan menggunakan pendekatan teori sosiologi dari Berger dan Merton.

2. Azmi et al. (2023)

Penelitian Azmi dan rekan-rekannya mengangkat topik *"Pendidikan Politik sebagai Sarana Mewujudkan Masyarakat Demokratis"*. Studi ini dilakukan melalui analisis konseptual dan normatif, dengan mengkaji

pentingnya pendidikan politik dalam membentuk masyarakat yang demokratis tanpa menitikberatkan pada kelompok sosial tertentu. Fokus dari penelitian ini adalah pada tingkat masyarakat secara umum, sehingga pendekatannya lebih bersifat makro. Dalam kajiannya, Azmi et al. tidak menggunakan teori sosiologi tertentu, melainkan lebih banyak mengacu pada prinsip-prinsip dasar demokrasi secara teoritis. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal menekankan pentingnya pendidikan politik sebagai sarana penanaman nilai demokrasi. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup kajiannya, di mana penelitian Azmi bersifat umum terhadap masyarakat luas, sedangkan penelitian ini spesifik mengkaji implementasi pendidikan politik pada mahasiswa FISIPOL UMB dalam konteks membangun budaya demokratis.

3. Wawan Patriansyah et al. (2024)

Wawan Patriansyah dan tim melakukan penelitian berjudul "*Analisis Peran Pendidikan Politik dalam Membangun Kesadaran Mahasiswa Berpartisipasi dalam Pemilu Tahun 2024*". Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan fokus utamanya adalah menganalisis sejauh mana pendidikan politik mempengaruhi tingkat partisipasi mahasiswa dalam Pemilu. Teori yang digunakan lebih mengarah pada teori partisipasi politik dan perilaku pemilih dalam konteks ilmu politik. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada objek kajiannya, yaitu sama-sama membahas mahasiswa sebagai subjek penelitian dalam konteks pendidikan politik. Namun, perbedaannya terletak pada fokus yang diambil. Patriansyah et al. menitikberatkan pendidikan politik pada peningkatan partisipasi elektoral di Pemilu, sedangkan penelitian ini lebih luas, berusaha membangun budaya demokratis mahasiswa dalam kehidupan sosial-politik sehari-hari di lingkungan kampus.

4. Sukarno (2011)

Penelitian Sukarno berjudul "*Pendidikan Politik dalam Demokratisasi*", mengkaji pendidikan politik dari sudut pandang normatif dan filosofis.

Fokus penelitian ini adalah pada pentingnya pendidikan politik sebagai alat untuk memperbaharui dan mendinamisir lembaga-lembaga demokrasi, tanpa mengambil studi kasus institusional tertentu. Sukarno menggunakan pendekatan yang bersifat umum dan filsafati terhadap konsep demokrasi, tanpa menggunakan teori sosiologi secara eksplisit. Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada keyakinan bahwa pendidikan politik merupakan sarana penting untuk membangun demokrasi yang lebih baik. Perbedaannya, Sukarno hanya membahas pada tataran konsep teoritis tanpa mengaitkan dengan studi kasus nyata, sedangkan penelitian ini mengkaji secara aplikatif bagaimana pendidikan politik diimplementasikan di FISIPOL UMB dan dianalisis menggunakan teori rekonstruksi sosial serta struktural fungsional.

5. Penelitian Ini

Penelitian ini mengangkat tema *"Implementasi Pendidikan Politik Bagi Mahasiswa FISIPOL UMB Guna Membangun Budaya Demokratis"*. Fokus penelitian diarahkan pada implementasi pendidikan politik di lingkungan kampus untuk membentuk budaya demokratis dan kesadaran kritis di kalangan mahasiswa. Teori yang digunakan adalah teori rekonstruksi sosial dari Peter L. Berger yang melihat pendidikan sebagai proses pembentukan realitas sosial, serta teori struktural fungsional dari Robert K. Merton yang melihat pendidikan sebagai mekanisme penting untuk menjaga stabilitas sosial dan memperkuat struktur demokrasi. Penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu karena menggabungkan kajian teoritis dengan studi kasus konkret di lingkungan FISIPOL UMB, serta secara spesifik berusaha mengkaji pembentukan budaya demokrasi bukan hanya dalam konteks elektoral, melainkan dalam kehidupan mahasiswa sehari-hari.

Gambar 2.1 Tabel Perbandingan Penelitian

No.	Peneliti	Judul / Fokus Penelitian	Metode / Pendekatan	Temuan Utama	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Sanusi & Darmawan (2016)	Pendidikan politik dalam membentuk karakter kepemimpinan lintas budaya di organisasi kepemudaan	Studi deskriptif pada organisasi pemuda	Pendidikan politik membentuk kepemimpinan berkarakter Pancasila	Fokus pada organisasi kepemudaan, bukan pada mahasiswa dan perguruan tinggi
2	Azmi et al. (2023)	Pendidikan politik sebagai sarana menciptakan masyarakat demokratis	Analisis konseptual dan normatif	Pendidikan politik penting dalam menanamkan nilai demokrasi	Pendekatan bersifat makro, tidak spesifik pada lingkungan kampus
3	Wawan Patriansyah et al. (2024)	Peran pendidikan politiki dalam membangun kesadaran mahasiswa berpartisipasi di Pemilu	Studi kasus dengan pendekatan kuantitatif	Pendidikan politik memengaruhi partisipasi pemilu	Fokus pada partisipasi elektoral, bukan pada budaya demokratis secara luas

		2024			
4	Sukarno (2011)	Pendidikan politik dalam proses demokratisasi	Pendekatan normatif-filosofis	Pendidikan politik sebagai alat pembaruan lembaga demokrasi	Analisis lebih filosofis, tanpa studi kasus institusional spesifik
5	Penelitian Ini	Implementasi pendidikan politik di FISIPOL UMB untuk membangun budaya demokratis	Studi kualitatif dengan pendekatan teori Berger & Merton	Pendidikan politik membentuk budaya demokratis dan kesadaran kritis mahasiswa	Fokus lokal pada FISIPOL UMB dan penggunaan teori sosiologi secara aplikatif

2.2 Kerangka Konsep dan Landasan Teori

Penelitian ini berlandaskan pada pemahaman bahwa pendidikan politik memiliki peran krusial dalam membentuk budaya demokratis di kalangan mahasiswa. Pendidikan politik tidak hanya berfungsi untuk memberikan wawasan mengenai sistem politik, tetapi juga bertujuan untuk mengembangkan sikap kritis, nilai-nilai demokrasi, serta kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di FISIPOL UMB, pendidikan politik diimplementasikan melalui berbagai kegiatan akademik dan non-akademik yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran politik di kalangan mahasiswa. Melalui interaksi sosial, diskusi, seminar, dan kurikulum yang mengintegrasikan aspek-aspek politik, diharapkan mahasiswa dapat merekonstruksi pemahaman mereka

mengenai demokrasi dengan cara yang lebih mendalam dan aplikatif. Dalam kerangka konsep penelitian ini, pendidikan politik diposisikan sebagai variabel independen yang berpengaruh terhadap pembentukan budaya demokratis sebagai variabel dependen. Di sini, pendidikan politik terlihat sebagai proses sosialisasi nilai, sedangkan budaya demokratis tercermin dalam sikap kritis, penghargaan terhadap perbedaan, partisipasi aktif, dan tanggung jawab sosial mahasiswa.

Proses ini melibatkan identifikasi, review, dan sintesis literatur-literatur relevan, serta memastikan teori yang dipilih dapat menjelaskan fenomena yang diteliti. Diharapkan kajian teoritis ini dapat membantu merincikan landasan teoritis, memperkuat metode penelitian, dan memberikan kontribusi pada pemahaman ilmiah di dalam bidang tersebut.

2.2.1 Implementasi

Implementasi adalah serangkaian kegiatan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Proses implementasi dimulai setelah semua aspek perencanaan dianggap telah sempurna. Menurut teori Jones, implementasi merujuk pada "aktivitas yang diarahkan untuk mewujudkan sebuah program" (proses mewujudkan program hingga menghasilkan hasil yang terlihat). Dengan demikian, implementasi merupakan langkah yang diambil setelah suatu kebijakan ditetapkan, yang bertujuan agar kebijakan tersebut dapat mencapai target yang diinginkan. Nurdin Usman, dalam bukunya yang berjudul "Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum," memberikan penjelasan lebih lanjut tentang pengertian implementasi sebagai berikut:

“Implementasi merupakan suatu proses yang berfokus pada aktivitas, aksi, tindakan, atau mekanisme dari suatu sistem. Lebih dari sekadar aktivitas, implementasi adalah kegiatan yang direncanakan dengan matang untuk mencapai tujuan tertentu.”

Dengan demikian, pengertian implementasi di atas menggambarkan bahwa ia tidak hanya sekedar kegiatan, melainkan juga merupakan langkah-langkah yang

dilaksanakan dengan penuh keseriusan dan berlandaskan rencana yang telah disusun dengan baik. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri, melainkan sangat dipengaruhi oleh objek lain, yaitu pelaksanaan suatu program.(Anggraeni, 2019)

Menurut Guntur Setiawan, implementasi dapat dipahami sebagai perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan antara tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Hal ini juga melibatkan jaringan pelaksana serta birokrasi yang efektif. Dari pendapat para ahli tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa implementasi adalah kegiatan yang terencana dan dilakukan dengan sungguh-sungguh, berdasarkan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, implementasi tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai aspek lain, termasuk program kurikulum yang diterapkan di sekolah atau lembaga terkait.(Anggraeni, 2019)

2.2.2 Pengertian Mahasiswa

Mahasiswa adalah orang yang sedang mengenyam pendidikan di universitas, baik yang dibiayai pemerintah maupun swasta, atau lembaga pendidikan lain yang memiliki tingkat kesetaraan. Kata "mahasiswa" terdiri dari dua kata, yaitu "maha" yang artinya lebih atau paling, dan "siswa" yang artinya pelajar. Mahasiswa umumnya berusia antara 18 sampai 25 tahun, yang merupakan masa akhir remaja hingga awal usia dewasa. Di usia ini, mahasiswa bisa memperkuat keputusan hidupnya(Hafizhuddin, 2019).

Secara umum, mahasiswa adalah orang yang sedang mengikuti pendidikan di tingkat perguruan tinggi, seperti universitas, sekolah tinggi, atau lembaga akademik lainnya. Status mahasiswa diberikan kepada setiap orang yang sedang mengikuti pendidikan tinggi, seperti sarjana, magister, atau doktor. Meski keduanya sedang belajar, ada perbedaan dalam status yang diberikan kepada orang-orang istimewa ini dibandingkan dengan

siswa biasa yang sedang menempuh pendidikan di sekolah. Menambahkan kata 'maha' di depan 'mahasiswa' memberikan kesan yang lebih penting dan mengagumkan bagi setiap orang yang memperoleh gelar tersebut. (Cora, D. I., Engka, J. N., & Pangemanan, D, 2019).

2.2.3 Pendidikan Politik

1. Pengertian Pendidikan Politik

Pendidikan politik merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran individu akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sekaligus membentuk sikap politik yang aktif dan kritis (Wawan Patriansyah et al. , 2024). Pendidikan ini tidak hanya mencakup pemahaman tentang sistem politik dan pemerintahan, tetapi juga merangkum nilai-nilai demokrasi, etika politik, serta tanggung jawab sosial. Bagi mahasiswa, pendidikan politik berperan penting sebagai sarana untuk menanamkan kesadaran berpolitik sejak dini.

Pendidikan politik bukan sekadar penggabungan antara kata "pendidikan" dan "politik"; maknanya jauh lebih luas. Pendidikan politik dapat didefinisikan sebagai suatu proses pendidikan untuk orang dewasa yang bertujuan untuk membina kemampuan individu dalam mengaktualisasikan dirinya sebagai pribadi yang mandiri serta mengembangkan perannya sebagai warga negara. Dalam bahasa Inggris, pendidikan politik sering disebut sebagai *political socialization* atau *political education*. Jika diterjemahkan secara harfiah, istilah *political socialization* berarti sosialisasi politik. (Handoyo, Eko & Lestari, 2017)

Pendidikan politik memiliki peran penting dalam membangun budaya politik yang sehat, yang pada gilirannya dapat menciptakan masyarakat demokratis yang bebas dari segala bentuk bias. Politik yang sehat adalah prasyarat utama untuk mewujudkan masyarakat demokratis

tersebut. Tanpa adanya politik yang sehat, arah dari demokrasi dapat terganggu, yang berpotensi menghasilkan kebebasan yang tidak terkendali dan pada akhirnya merusak esensi demokrasi itu sendiri. Di sinilah letak pentingnya pendidikan politik.

Giesecke, seorang ahli didaktik, pendidik, dan politikus Jerman, mengartikan pendidikan politik sebagai berikut:

- a. **Bildungswissen**, yang berarti kemampuan untuk memahami bentuk dan gambaran tentang manusia (*mensbeeld*) serta perkembangannya, di samping juga menghayati budaya bangsa sendiri. Dengan pemahaman ini, seseorang dapat menyadari identitasnya, memiliki keyakinan yang kuat, serta mampu mengatasi kompleks rasa rendah diri dan ketergantungan terhadap kekuatan atau bangsa lain. Selain itu, individu tersebut akan dapat memahami dengan jelas kekuatan bangsa sendiri, pandangan hidup, dan filsafat hidup yang dianut, dalam hal ini Pancasila, yang dijadikan sebagai pedoman dalam perjuangan untuk mencapai tujuan hidup berbangsa, yaitu kehidupan yang sejahtera.
- b. **Orientierungswissen** adalah kemampuan untuk berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan yang dapat membawa kebahagiaan, keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi setiap warga negara serta umat manusia. Secara objektif, kita harus berani melihat kenyataan yang ada dan bersedia melakukan penyesuaian terhadap situasi politik yang kurang stabil, dengan cara mengkritisi berbagai hal yang masih rentan dan unsur pondasi yang belum kuat. Dengan demikian, kita dapat menemukan solusi dan penyelesaian yang lebih matang, serta berhasil menarik diri dari berbagai jalan buntu menuju keseimbangan dan keselarasan dalam kehidupan bersama.

2. Tujuan Pendidikan Politik

Dalam Undang-Undang Nomor II Tahun 2008 Pasal 31 mengenai Partai Politik, dijelaskan bahwa partai politik memiliki tujuan penting dalam mengedukasi masyarakat. Tujuan-tujuan tersebut meliputi:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara.
- b. Mendorong partisipasi politik serta inisiatif masyarakat dalam berperan aktif di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. Mengembangkan kemandirian dan kedewasaan masyarakat, serta membangun karakter bangsa demi menjaga persatuan dan kesatuan.

Selain itu, Khoiron turut menjelaskan bahwa pendidikan politik bertujuan untuk memperluas pemahaman masyarakat. Pertama ia menjelaskan bahwasanya pendidikan politik mempromosikan perluasan wawasan Partisipasi dalam pemerintahan, baik di tingkat lokal, provinsi, maupun nasional, sangat penting untuk mendukung proses dan tujuan perkumpulan warga masyarakat sipil. Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai dasar-dasar sejarah, filsafat, politik, sosial, dan ekonomi demokrasi, serta konstitusi Indonesia dan negara-negara barat. Selanjutnya, penting untuk menanamkan komitmen yang rasional terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai fundamental yang tercantum dalam dokumen inti. Terakhir, kita juga perlu mempromosikan pemahaman tentang peran mendasar dari Lembaga-lembaga berikut berkomitmen untuk mengusung nilai-nilai masyarakat sipil dalam upaya memperjuangkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, setara, dan bermartabat di Indonesia. (Handoyo, Eko & Lestari, 2017)

3. Peran Pendidikan Politik Dalam Perguruan Tinggi

Azmi et al. (2023) menekankan bahwa pendidikan memiliki kekuatan dalam membentuk cara berpikir dan nilai-nilai politik mahasiswa. Perguruan tinggi, khususnya fakultas ilmu sosial dan politik, memiliki tanggung jawab strategis dalam memberikan pendidikan politik yang kritis dan transformatif. Dalam konteks ini, FISIPOL UMB sebagai institusi pendidikan tinggi yang memfokuskan diri pada ilmu sosial dan politik, memiliki potensi besar dalam membina mahasiswa agar menjadi warga negara yang sadar politik dan aktif dalam demokrasi.

2.2.3 Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi bisa dilihat dari cara menggambarkan konsep tersebut dalam bahasa (kajian epistemologis) dan penggunaan istilah-istilahnya (kajian terminologis). Secara epistemologis, kata "demokrasi" terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu "demos" yang artinya rakyat atau penduduk suatu wilayah, dan "cretein" atau "cratos" yang artinya kekuasaan atau kedaulatan. Jadi dalam bahasa lain, demos-cretein atau demos-cratos adalah bentuk negara di mana dalam sistem pemerintahan, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, keputusan diambil secara bersama-sama oleh rakyat, rakyat yang memiliki kekuasaan, pemerintahan yang dibuat rakyat dan dijalankan rakyat. Sementara itu, arti demokrasi menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Joseph A. Schemer Demokrasi adalah sebuah rencana sistematis yang dirancang untuk mengambil keputusan politik, di mana setiap individu diberi kekuasaan untuk menentukan cara berkompetisi secara adil berdasarkan suara rakyat.
- b. Sidney Hook mendefinisikan demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan penting diambil oleh pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung,

berdasarkan konsensus mayoritas yang diperoleh dari suara bebas masyarakat dewasa.

- c. Menurut Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana para pemimpin harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka di ranah publik kepada warga negara. Warga negara tersebut berpartisipasi secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan wakil-wakil yang mereka pilih.
- d. Henry B. Mayo menjelaskan bahwa demokrasi sebagai sistem politik adalah sistem yang menegaskan bahwa kebijakan publik ditentukan berdasarkan suara kebanyakan melalui wakil-wakil yang secara efektif diawasi oleh rakyat. Pemilihan-pemilihan itu diadakan secara rutin, menerapkan prinsip keadilan politik, dan dilakukan dalam situasi di mana kebebasan berpolitik terjamin..(Sulisworo et al., 2016)

2. Kesadaran Politik Mahasiswa

Kesadaran politik mahasiswa di Indonesia masih menunjukkan tingkat yang beragam. Beberapa penelitian mencatat rendahnya minat mahasiswa terhadap kegiatan politik formal, meskipun mereka menyadari pentingnya peran mereka dalam demokrasi. Sukarno (2011) menjelaskan bahwa demokrasi sebagai sistem pemerintahan menuntut partisipasi aktif dari warga negara yang memahami hak dan tanggung jawabnya. Pendidikan politik menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan ketidakstabilan demokrasi serta sebagai sarana untuk memperbarui institusi sosial dan politik yang ada.

2.2.4 Landasan Teori

2.2.4.1. Teori Peter L. Berger

Peter L. Berger bersama Thomas Luckmann dalam karya klasiknya *"The Social Construction of Reality"* (1966) mengemukakan bahwa realitas sosial bukanlah sesuatu yang hadir secara alami, melainkan dibentuk melalui proses interaksi sosial. Menurut Berger, kehidupan sosial manusia adalah produk dari konstruksi yang dilakukan secara terus-menerus melalui tiga tahapan utama, yaitu: **eksternalisasi**, **obyektivasi**, dan **internalisasi**.

1. **Eksternalisasi** adalah proses di mana individu mengekspresikan diri ke dunia luar dalam bentuk aktivitas sosial, nilai, norma, dan institusi.
2. **Objektivasi** terjadi ketika hasil-hasil eksternalisasi tersebut menjadi realitas yang dianggap objektif, di luar individu, dan mengikat bagi masyarakat.
3. **Internalisasi** adalah tahap di mana individu mengambil kembali realitas sosial tersebut ke dalam kesadaran pribadinya, menjadikannya sebagai bagian dari identitas dan perilakunya.

Dalam pandangan Berger, pendidikan – termasuk pendidikan politik – adalah salah satu sarana penting dalam proses konstruksi sosial ini. Melalui pendidikan, individu diajarkan nilai, norma, dan pemahaman tertentu tentang dunia sosial dan politik, yang kemudian diinternalisasi menjadi bagian dari identitas mereka.

2.2.4.2 Keterkaitan dengan Penelitian

Dalam konteks penelitian ini, teori konstruksi sosial Berger digunakan untuk memahami bagaimana **pendidikan politik di FISIPOL UMB** membentuk realitas sosial mahasiswa mengenai demokrasi. Proses eksternalisasi terjadi ketika dosen, kurikulum, seminar, dan kegiatan organisasi mahasiswa memunculkan nilai-nilai demokratis seperti partisipasi politik, penghargaan terhadap perbedaan, dan sikap kritis terhadap kekuasaan.

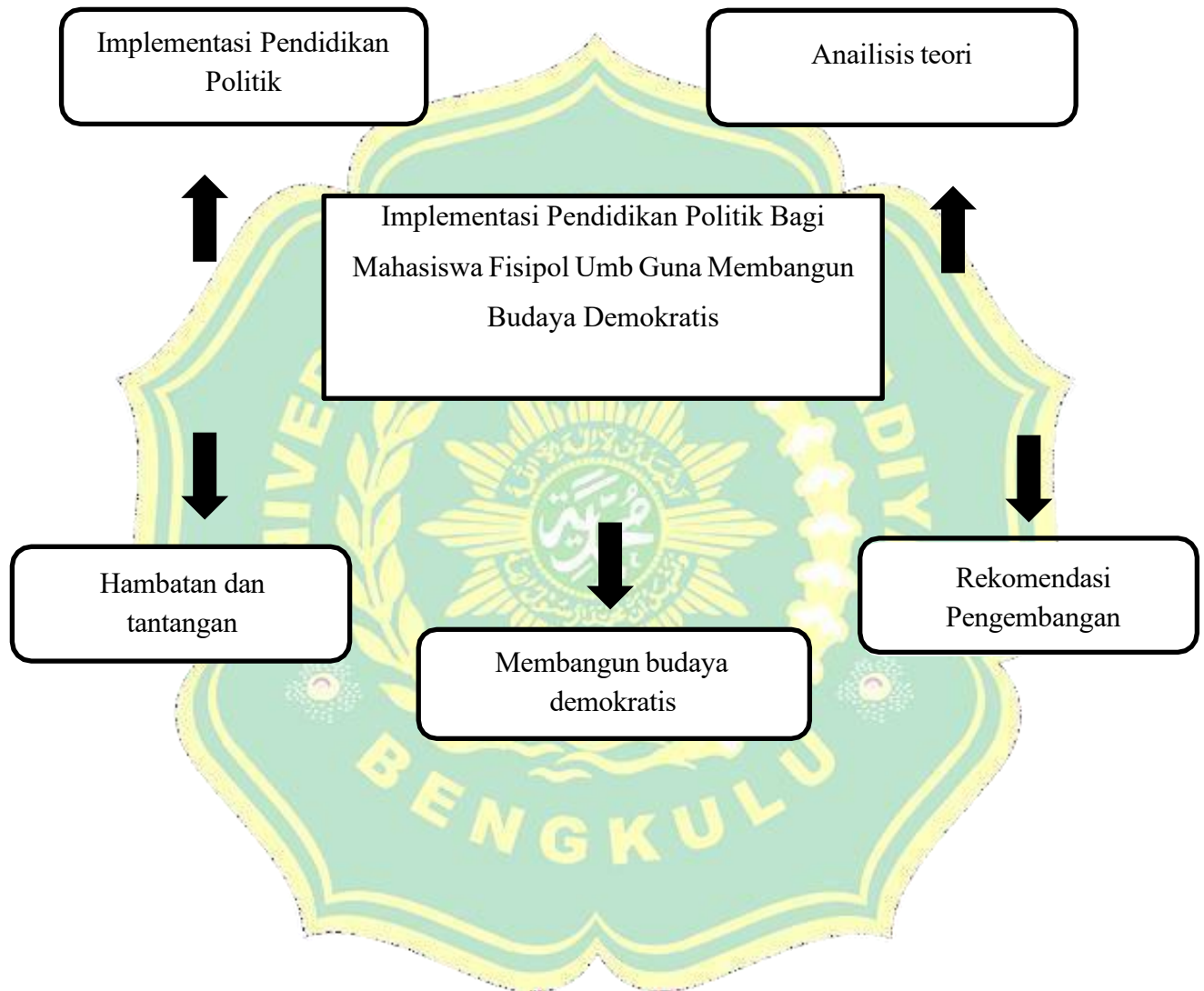
Nilai-nilai tersebut kemudian melalui proses objektivasi: menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di lingkungan kampus — seperti dalam diskusi kelas, pemilihan ketua organisasi, dan forum akademik — sehingga dianggap sebagai norma atau sesuatu yang "biasa" dan "seharusnya" dijalani. Akhirnya, melalui internalisasi, mahasiswa FISIPOL UMB mengadopsi nilai-nilai demokratis tersebut ke dalam sikap, cara berpikir, dan perilaku mereka, baik dalam lingkungan kampus maupun dalam kehidupan bermasyarakat setelah lulus.

Dengan demikian, pendidikan politik bukan hanya proses transfer pengetahuan, melainkan juga **proses rekonstruksi sosial** yang membangun kesadaran demokratis mahasiswa secara bertahap dan mendalam. Ini sejalan dengan tujuan penelitian, yaitu membangun budaya demokratis melalui implementasi pendidikan politik.

2.2.5 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah cara berpikir peneliti yang menjadi dasar untuk memperkuat fokus penelitian dan menjelaskan latar belakang penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif, dibutuhkan dasar yang mengarahkan penelitian agar prosesnya lebih jelas dan terarah. Oleh karena itu, diperlukan gambaran berpikir untuk memperluas konteks dan konsep penelitian lebih lanjut agar dapat menjelaskan dengan jelas konteks penelitian, metode yang digunakan, serta penerapan teori dalam penelitian tersebut. Penjelasan yang dibuat akan menggabungkan teori dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Peneliti mengungkapkan kerangka teori dalam bentuk kerangka konseptual sesuai dengan hal-hal yang akan diteliti oleh peneliti tersebut. Implementasi Pendidikan Politik Bagi Mahasiswa Fisipol Umb Guna Membangun Budaya Demokratis.

Adapun kerangka berpikir dari penelitian ini sebagai berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi yang telah ditetapkan oleh penulis dan diobservasi yakni di kawasan universitas Muhammadiyah Bengkulu tepatnya di Kampus 4 Seputaran Gedung Ahmad Dahlan (AD). Dimana lokasi yang ditentukan tersebut memiliki kecocokan yang tinggi dengan penelitian yang sedang diamati yang memang dikhususkan untuk menjangkau mahasiswa aktif yang ada diperguruan tinggi tepatnya mahasiswa fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Adapun data pendukung adalah sampel penelitian ini mencakup beberapa elemen mahasiswa baik yang aktif di ruang pembelajaran (kelas), organisasi mahasiswa (ORMAWA) dan organisasi kepemudaan internal Muhammadiyah (IMM).

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak bulan April dimulai dari 08 s/d Selesai. Berikut adalah jadwal penelitian :

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	BulanKe-				
		I	II	III	IV	V
1	Pembuatan Proposal Penelitian					
3	Pelaksanaan Penelitian					
4	Pembuatan Skripsi					
5	Sidang Skripsi					
6	Penyelesaian Tahap Akhir Skripsi					

3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang hanya menjelaskan suatu gejala, bukan untuk mencari pengaruh, melainkan lebih fokus pada penggambaran variabel tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi atau fakta yang ditemukan secara alami, dengan menganalisisnya secara lebih mendalam. Implementasi Pendidikan politik dalam membangun budaya demokratis itu sendiri. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami nilai dari satu atau beberapa variabel mandiri, tanpa membandingkan variabel tersebut dengan yang lain atau menghubungkannya. Menurut Arif Rachman (2023), data kualitatif adalah jenis data yang berupa kata, kalimat, skema, atau gambar. Berikut ini adalah desain penelitian yang telah dipilih penulis agar dapat mengkaji lebih dalam mengenai cara melakukan analisis implementasi. Pendidikan Politik Bagi Mahasiswa Fisipol UMB

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk membatasi studi kualitatif serta membatasi penelitian agar dapat memilih data yang relevan dan tidak relevan (Moleong, 2010). Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan atau urgensi masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini mencakup beberapa bagian yang dibahas dalam penelitian tersebut. Fokus penelitian ini dapat dilihat berdasarkan teori yang digunakan, seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2 Fokus Penelitian

No.	Aspek
1	Implementasi Pendidikan Politik
2	Kesadaran Demokratis Mahasiswa
3	Hambatan Pendidikan
4	Rekomendasi Pengembangan

3.4 Sumber Data

1. Data Primer

S. Nasution (2017) berpendapat bahwa data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Sedangkan menurut Lofland bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang implementasi Pendidikan politik dalam membangun budaya demokratis.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya. Data sekunder juga dapat berupa majalah, buletin, publikasi dari berbagai organisasi, lampiran-lampiran dari badan-badan resmi seperti kementerian-kementerian, hasil-hasil studi, tesis, hasil survey, studi histories, dan sebagainya

3.5 Penentuan Informasi Informan Penelitian

Pengambilan data dalam penelitian ini didapatkan dengan menggunakan teknik sampling purposive. Teknik pengambilan sampel purposif ini adalah cara memilih informan dengan tujuan tertentu, dan mempertimbangkan berbagai hal sesuai dengan topik penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang penting bagi penelitian. Dalam hal ini, peneliti memilih informan yang dianggap memahami permasalahan yang akan dikaji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data dalam penelitian kualitatif yaitu:

1. Mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang ada diperguruan tinggi
2. Mahasiswa yang Aktif di Organisasi Mahasiswa (Ormawa)
3. Mahasiswa yang Aktif di Organisasi kepemudaan di internal Muhammadiyah (IMM)

Kriteria di atas dipilih sebagai dasar pemilihan informan yang akan diwawancarai agar hasil wawancara yang diperoleh lebih dapat dipercaya. Selain itu, informan juga sudah menyetujui untuk diberi wawancara dan memberikan informasi yang benar agar hasil penelitian menjadi lebih tepat dan kredibilitasnya dapat dipercaya.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data-data keperluan penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.

1. Teknik Observasi

Pengamatan atau observasi dilakukan dalam penelitian ilmiah untuk mendapatkan fakta atau data yang dibutuhkan dalam penelitian ilmiah tersebut di bidang yang diteliti. Pengamatan ini dilakukan peneliti untuk melihat dan mengamati langsung, lalu mencatat perilaku dan peristiwa sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat observasi berupa catatan lapangan dan pedoman observasi. Observasi ini dilakukan agar dapat diamati secara langsung dari sudut pandang mahasiswa.

2. Teknik Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang, yaitu orang yang bertanya (pewawancara) dan orang yang menjawab (terwawancara), di mana pewawancara memberikan pertanyaan dan terwawancara menjawabnya (Moleong, 2021:186). Wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam agar komunikasi dan interaksi selama pengumpulan data dapat berjalan dengan terarah dan efektif. Data primer dalam penelitian ini berupa kata-kata, informasi, ungkapan, dan tanggapan dari informan yang diperoleh melalui penelitian tentang implementasi pendidikan politik dalam membangun budaya demokratis. Pendekatan yang digunakan adalah wawancara dengan bantuan pedoman wawancara

serta memperhatikan spontanitas dari informan selama proses wawancara. Pedoman wawancara yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan wawancara, kemudian dilampirkan di bagian akhir dari desain penelitian ini.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi adalah proses memeriksa dan menganalisis dokumen-dokumen yang terkait dengan topik penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, data sekunder merujuk pada data yang digunakan sebagai bahan pendukung, di mana peneliti dapat mengumpulkan berbagai jenis data, laporan, dan dokumen resmi dari tempat penelitian dilakukan. Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi profil serta foto-foto dokumentasi saat peneliti melakukan wawancara dan observasi di Fakultas Ilmu Sosial Politik UMB.

3.7 Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data diperlukan dalam penelitian sebagai cara menunjukkan tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan terhadap data tersebut. Pengecekan kebenaran data dalam penelitian ini menggunakan beberapa kriteria, yaitu kredibilitas, kepastian, dan ketergantungan. Pengecekan data dapat dilakukan dengan cara mengamati ciri-ciri dan unsur-unsur yang ada dalam situasi yang sangat relevan dengan isu yang sedang dicari.

3.8 Analisis Data

Alur yang digunakan dalam penyajian data dalam penelitian ini mengikuti konsep Miles dan Huberman seperti yang disampaikan oleh Sugiyono (2018:191). Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data dalam waktu tertentu. Mereka menjelaskan bahwa dalam proses analisis data terdapat tiga aktivitas utama, yaitu mengurangi data, menampilkan data, dan membuat kesimpulan.

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data dalam penelitian ini adalah proses memilih informasi penting, fokus pada hal-hal utama, menyederhanakan, membuat ringkasan, serta mengubah data hasil penelitian di lapangan. Di tahap ini, reduksi data termasuk dalam proses analisis yang bertujuan memperjelas, mengelompokkan, mengarahkan, dan memilih data yang penting dari yang tidak, serta mengatur data secara spesifik agar bisa ditarik kesimpulan dan memverifikasi kesimpulan tersebut.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data adalah bagian dari analisa yang berarti menyajikan data sebagai kumpulan informasi yang teratur, sehingga memungkinkan adanya kesimpulan dan tindakan yang diambil. Dengan melihat berbagai bentuk penyajian data yang ada, kita bisa tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan, berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari informasi tersebut.

3. Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Bagian terakhir dalam penyajian data kualitatif adalah menarik kesimpulan dan memverifikasi hasilnya. Penarikan kesimpulan adalah bagian dari sebuah kegiatan yang terkait dengan proses deduksi suatu konfigurasi. Pembuktian kembali atau verifikasi dilakukan agar dapat mendapatkan persetujuan dan pembenaran, sehingga validitas bisa tercapai.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Fisipol UMB

FISIPOPOL UMB memiliki peran yang penting dalam FISIPOL UMB (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu) adalah fakultas yang fokus pada pengajaran dan penelitian di bidang ilmu sosial dan politik. Fakultas ini memiliki berbagai program studi yang berorientasi pada pengembangan pemahaman mahasiswa mengenai isu-isu sosial dan politik, serta mempersiapkan mereka untuk menjadi profesional di berbagai bidang terkait. Dalam konteks pendidikan politik, FISIPOL UMB memiliki peran penting untuk menghasilkan mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memahami dinamika politik serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik.

Adapun program studi yang tersedia di Fisipol sebagai berikut :

No.	Keterangan	sasaran
1.	Sosiologi	Mahasiswa aktif di semester 2,4,6 dan 8
2.	Ilmu Komunikasi	Mahasiswa aktif di semester 2,4,6 dan 8
3.	Administrasi Publik	Mahasiswa aktif di semester 2,4,6 dan 8

2. Ormawa Fisipol

Dalam penelitian ini, peneliti juga memilih ruang organisasi mahasiswa sebagai objektifikasi penelitian dimana mahasiswa yang terlibat ormawa memang memiliki dorongan lebih dalam berpartisipasi dalam internal akademik selain dari proses pembelajaran adapun disini aspek yang dipilih oleh peneliti yakni :

No.	Keterangan	sasaran
1.	Badan Eksekutif Mahasiswa Fisipol UMB	Mahasiswa aktif di semester 2,4,6 dan 8
2.	Dewan Perwakilan Mahasiswa Fisipol UMB	Mahasiswa aktif di semester 2,4,6 dan 8

3. Organisasi kepemudaan Internal Muhammadiyah

Adapun terakhir peneliti juga melibatkan mahasiswa yang tergolong produktif pada keikutsertaan dalam organisasi kepemudaan yang ada di internal muhammadiyah yakni sebuah organisasi otonom yang berada di bawah naungan langsung muhammadiyah yaitu organisasi **IMM**.

4. Profil Informan

Adapun Informan dalam Penelitian ini dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.1 Informan

No.	Nama (Inisial)
1	AP
2	ADH
3	MAF
4	IA

5	TQ
6	RS

4.2 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara mendalam dengan enam informan yang terdiri dari mahasiswa FISIPOL, pengurus ORMAWA, dan kader IMM, diperoleh data sebagai berikut:

1. Mahasiswa FISIP (Ruang Perkuliahan)

Informan 1 (AP, mahasiswa Sosiologi semester 5):

“Kalau di kelas, pendidikan politik itu terasa ketika dosen sering mengaitkan teori dengan kondisi politik sekarang. Misalnya saat membahas teori demokrasi, dosen mencontohkan langsung dengan isu pemilu atau kebijakan pemerintah terbaru. Dari situ kami jadi lebih paham bahwa demokrasi itu bukan sekadar teori, tapi bagian dari kehidupan kita sehari-hari.”

Informan 2 (IA, mahasiswa Sosiologi semester 7):

“Menurut saya implementasi pendidikan politik di ruang kuliah memang membantu membuka pola pikir. Tapi kadang masih kurang diskusi terbuka. Mahasiswa cenderung diam, padahal topik yang dibahas relevan dengan kondisi politik di luar kampus. Jadi perlu metode belajar yang lebih interaktif.”

Analisis:

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mahasiswa FISIP merasakan manfaat pendidikan politik dalam perkuliahan, terutama dalam mengaitkan teori dengan realitas. Namun, tantangan muncul pada kurangnya ruang diskusi interaktif sehingga partisipasi kritis belum maksimal.

2. Mahasiswa ORMAWA (BEM & DPM FISIPOL)

Informan 3 (ADH, pengurus BEM FISIPOL):

“Bagi kami di BEM, pendidikan politik itu tidak hanya di kelas, tapi juga lewat organisasi. Misalnya saat menyusun program kerja, kami belajar bagaimana menyerap aspirasi mahasiswa dan membuat keputusan secara musyawarah. Itu bagian dari latihan demokrasi nyata.”

Informan 4 (RS, anggota DPM FISIPOL):

“Saya melihat organisasi menjadi ruang belajar politik yang lebih praktis. Disini kita berlatih berdebat, voting, bahkan berbeda pendapat dengan sehat. Itu implementasi langsung dari nilai demokrasi. Hanya saja kadang ego pribadi masih muncul, jadi prosesnya belum sepenuhnya ideal.”

Analisis:

Dari sisi ORMAWA, implementasi pendidikan politik lebih tampak dalam praktik kepemimpinan, pengambilan keputusan, serta dinamika organisasi. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa budaya demokratis dibangun melalui pengalaman langsung, bukan hanya teori.

3. Kader IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah)

Informan 5 (MAF, kader IMM semester 7):

“IMM memberi ruang lebih luas untuk pendidikan politik yang berlandaskan nilai Islam dan Pancasila. Misalnya dalam kajian rutin, kami diajak melihat politik bukan sekadar perebutan kekuasaan, tapi sebagai jalan pengabdian. Itu membentuk kesadaran bahwa demokrasi harus bernilai moral.”

Informan 6 (TQ, kader IMM semester 8):

“Bagi saya, IMM adalah tempat yang mengajarkan pentingnya keberanian bersuara. Implementasi pendidikan politik di IMM membuat kami terbiasa kritis

terhadap kebijakan kampus maupun isu nasional. Jadi, budaya demokratis itu terbangun lewat sikap aktif dan tanggung jawab sosial.”

Analisis:

Perspektif kader IMM menekankan aspek nilai dan moral dalam pendidikan politik. Implementasi pendidikan politik dipahami bukan hanya teknis organisasi, tetapi juga ideologis—yakni membentuk kader yang kritis sekaligus berakhlak.

Kesimpulan

Dari ketiga elemen mahasiswa dapat disimpulkan bahwa implementasi pendidikan politik:

1. **Di ruang kuliah** → lebih bersifat teoritis, namun membantu menambah wawasan dasar demokrasi.
2. **Di ORMAWA** → menjadi praktik langsung demokrasi dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan.
3. **Di IMM** → menekankan pembentukan nilai moral dan sikap kritis berbasis ideologi.

Secara keseluruhan, pendidikan politik di FISIPOL UMB berkontribusi pada pembentukan budaya demokratis mahasiswa, meskipun masih ada tantangan berupa kurangnya diskusi interaktif, ego organisasi, dan konsistensi internalisasi nilai.

4.3 Pembahasan

Pendidikan politik di FISIPOL UMB diimplementasikan melalui dua jalur utama, yaitu **jalur akademik** (mata kuliah, seminar, diskusi ilmiah) dan **jalur non-akademik** (organisasi mahasiswa serta kaderisasi IMM). Melalui jalur akademik, mahasiswa diperkenalkan pada konsep-konsep politik, demokrasi, dan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Dosen sering mengaitkan teori

dengan kondisi aktual sehingga mahasiswa dapat memahami relevansi ilmu politik dengan kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, jalur non-akademik memberi kesempatan mahasiswa untuk mempraktikkan nilai-nilai demokratis secara langsung. ORMAWA menjadi wadah latihan kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan penyampaian aspirasi. IMM menambahkan dimensi ideologis dan moral, menjadikan politik bukan hanya teknis kekuasaan, tetapi juga sarana pengabdian yang bernilai etis.

Pembahasan pada penelitian ini mengintegrasikan temuan lapangan melalui wawancara dengan enam informan yang mewakili tiga elemen mahasiswa (mahasiswa FISIP, pengurus ORMAWA, dan kader IMM) dengan teori konstruksi sosial Peter L. Berger. Teori ini menjelaskan bahwa realitas sosial dibentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi, yang berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks penelitian ini, realitas yang dibangun adalah budaya demokratis mahasiswa FISIPOL UMB melalui implementasi pendidikan politik.

1. Eksternalisasi: Pendidikan Politik sebagai Ekspresi Nilai Demokrasi

Tahap eksternalisasi merupakan proses di mana individu atau institusi mengekspresikan gagasan, nilai, dan pengetahuan ke dalam dunia sosial. Berdasarkan temuan penelitian, dosen, kurikulum, serta kegiatan akademik di FISIPOL menjadi sarana eksternalisasi nilai-nilai demokratis. Hal ini tampak dari pernyataan **AP** yang menyebutkan bahwa dosen sering menghubungkan teori demokrasi dengan isu aktual, sehingga mahasiswa memahami demokrasi bukan sekadar konsep abstrak.

Selain itu, pada ranah ORMAWA, eksternalisasi terlihat dalam praktik organisasi mahasiswa, seperti musyawarah, debat, hingga voting, sebagaimana disampaikan oleh **MAF**. Sementara pada IMM, eksternalisasi terjadi dalam

bentuk kajian ideologis yang memaknai politik sebagai sarana pengabdian, bukan sekadar perebutan kekuasaan (TQ).

Dengan demikian, eksternalisasi pendidikan politik di FISIPOL UMB berlangsung dalam tiga ruang utama: ruang akademik (kelas), ruang organisasi mahasiswa (ORMAWA), dan ruang kaderisasi ideologis (IMM).

2. Objektivasi: Pendidikan Politik Menjadi Kenyataan Sosial

Tahap objektivasi adalah saat hasil eksternalisasi menjadi realitas sosial yang diakui bersama dan dianggap “seharusnya” ada. Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai demokrasi telah melembaga dalam kehidupan kampus.

Mahasiswa FISIP melihat perkuliahan politik sebagai forum wajar untuk menumbuhkan sikap kritis (ADH). Bagi ORMAWA, mekanisme demokratis seperti rapat, musyawarah, dan voting menjadi kebiasaan organisasi yang tidak lagi dipertanyakan (IA). Sementara di IMM, tradisi berdiskusi kritis, menyuarakan aspirasi, dan membangun kesadaran moral dianggap sebagai kewajiban kader

Objektivasi ini menunjukkan bahwa pendidikan politik di FISIPOL tidak hanya dipahami sebagai instruksi formal, tetapi telah berubah menjadi praktik sosial yang mengikat mahasiswa. Demokrasi menjadi norma bersama yang tercermin dalam pola interaksi, baik dalam diskusi kelas, dinamika organisasi, maupun kegiatan kaderisasi.

3. Internalisasi: Nilai Demokrasi Menjadi Bagian Identitas Mahasiswa

Tahap internalisasi adalah saat individu menyerap realitas sosial ke dalam kesadaran pribadinya. Dari hasil wawancara, terlihat bahwa mahasiswa mulai membangun identitas diri yang demokratis:

- Mahasiswa FISIP merasa lebih kritis dalam melihat isu politik dan lebih terbuka terhadap perbedaan pendapat.

- Mahasiswa ORMAWA belajar bertanggung jawab, berani menyampaikan pendapat, sekaligus menghargai hasil keputusan kolektif.
- Kader IMM menginternalisasi nilai demokrasi dengan basis moral dan ideologi, sehingga terbentuk kesadaran politik yang lebih mendalam dan religius.

Dengan demikian, internalisasi pendidikan politik di FISIPOL UMB tidak hanya membentuk pengetahuan, tetapi juga **sikap dan identitas demokratis** mahasiswa, yang kemudian memengaruhi cara mereka berinteraksi di dalam maupun di luar kampus.

4. Komparasi Hasil Penelitian dan Teori Konstruksi Sosial Berger

Jika dibandingkan dengan teori Berger, maka hasil penelitian ini menunjukkan kesesuaian yang kuat:

- **Eksternalisasi:** Pendidikan politik diekspresikan melalui kegiatan perkuliahan, organisasi, dan kaderisasi.
- **Objektivasi:** Kegiatan tersebut menjadi realitas bersama yang diterima mahasiswa sebagai norma demokrasi kampus.
- **Internalisasi:** Mahasiswa menyerap nilai-nilai tersebut ke dalam identitas mereka, sehingga terbentuk sikap kritis, partisipatif, dan berorientasi pada nilai moral.

Namun, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan dalam setiap tahap. Pada eksternalisasi, kendala muncul dalam bentuk metode perkuliahan yang masih pasif. Pada objektivasi, dinamika organisasi kadang masih dipengaruhi ego personal. Pada internalisasi, tidak semua mahasiswa mampu konsisten mengimplementasikan nilai demokrasi di luar ruang kampus.

5. Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pendidikan politik di FISIPOL UMB memang sejalan dengan teori konstruksi sosial Berger. Pendidikan politik tidak berhenti pada transfer pengetahuan, melainkan

membentuk realitas sosial yang dialami mahasiswa sehari-hari. Proses ini pada akhirnya menghasilkan **budaya demokratis** yang berkembang secara alami di kalangan mahasiswa, meskipun masih memerlukan penguatan agar internalisasi nilai.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian mengenai implementasi pendidikan politik dalam membangun budaya demokratis di FISIPOL Universitas Muhammadiyah Bengkulu menghasilkan beberapa temuan penting. Pendidikan politik di lingkungan kampus ini dilaksanakan melalui dua jalur utama, yaitu jalur akademik dan non-akademik. Jalur akademik berjalan melalui mata kuliah, diskusi ilmiah, dan seminar yang menekankan penguasaan teori politik sekaligus mengaitkannya dengan isu-isu aktual, sehingga mahasiswa dapat memahami bahwa politik dan demokrasi bukan hanya konsep abstrak melainkan realitas yang hadir dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jalur non-akademik berlangsung melalui kegiatan organisasi mahasiswa (ORMAWA) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang memberikan pengalaman langsung dalam mempraktikkan nilai-nilai demokratis. Melalui organisasi, mahasiswa terbiasa bermusyawarah, melakukan voting, dan mengelola aspirasi, sedangkan IMM memperkuat dimensi ideologis dan moral dengan menekankan politik sebagai sarana pengabdian, kritik sosial, dan pengembangan sikap beretika.

Dalam kaitannya dengan teori konstruksi sosial Peter L. Berger, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa proses demokratisasi di FISIPOL UMB terbentuk melalui tiga tahapan utama. Pertama, eksternalisasi, ketika dosen, organisasi, dan IMM mengekspresikan nilai-nilai demokrasi ke dalam ruang akademik maupun forum non-akademik. Kedua, objektivasi, ketika ekspresi tersebut melembaga menjadi kebiasaan dan norma dalam kehidupan mahasiswa, seperti budaya diskusi di kelas, mekanisme musyawarah dalam organisasi, dan forum kajian ideologis di IMM. Ketiga, internalisasi, ketika mahasiswa menyerap nilai demokrasi ke dalam kesadaran diri, sehingga terbentuk identitas pribadi yang lebih kritis, partisipatif, dan berlandaskan etika. Dengan demikian, pendidikan

politik di FISIPOL UMB tidak hanya sekadar mentransfer pengetahuan, melainkan juga mengonstruksi realitas sosial yang melahirkan budaya demokratis di kalangan mahasiswa.

Meski demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan. Di ruang perkuliahan, diskusi masih cenderung pasif sehingga mahasiswa belum optimal mengekspresikan sikap kritis. Dalam organisasi mahasiswa, dinamika demokrasi kadang terhambat oleh ego personal dan kepentingan kelompok. Sementara di IMM, meskipun nilai moral dan ideologi ditekankan, konsistensi kader dalam menjaga prinsip demokratis ketika terjun pada ranah politik praktis sering kali menjadi ujian tersendiri.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa saran. Pihak fakultas diharapkan dapat meningkatkan metode pembelajaran interaktif agar mahasiswa lebih berani berdiskusi dan berargumentasi. Organisasi mahasiswa perlu memperkuat praktik demokrasi yang sehat dengan menekankan musyawarah dan transparansi, sementara IMM diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara sikap kritis dan landasan moral agar nilai demokrasi tidak terjebak pada kepentingan praktis semata. Mahasiswa secara umum didorong untuk lebih aktif berpartisipasi dalam forum akademik maupun organisasi serta mengimplementasikan nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya di kampus tetapi juga di masyarakat. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan dengan pendekatan yang lebih beragam, misalnya kuantitatif atau metode campuran, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas dan komprehensif tentang efektivitas pendidikan politik dalam membangun budaya demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianda, A. (2023). Peran Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Semangat Demokrasi Generasi Muda di Kabupaten Belitung Timur. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(9), 325–332. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i9.2049>
- Amanda, T., Novriza, H., & Dhewantoro, S. (2025). Pendidikan Politik sebagai Fondasi Demokrasi dalam Kehidupan Masyarakat Multikultural. *Jurnal Governance and Politics (JPG)*, 5(1), 7–14.
- Anggraeni, I. (2019). Pengertian Implementasi dan PendapaT Ahli. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 16–36.
- Azmi, L., Batubara, S. M., & Hati, C. (2023). Implementasi Pendidikan Politik Bagi Warga Negara Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Demokratis. *Jurnal Media Ilmu*, 2(2), 173–186.
- Hafizhuddin, M. I. (2019). Hubungan Antara Self Disclousure Melalui Status Wa Dan Kualitas Hidup Pada Mahasiswa Di Universitas Muhammadiyah Surabaya. *Skrip*, h. 2.
- Handoyo, Eko & Lestari, P. (2017). *Eko Handoyo dan Puji Lestari, Pendidikan Politik*. 16–52.
- Prayugo, A., & Prayitno, R. B. P. (2022). Pendidikan Politik Sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3(3), 427–442. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v3i3.138>
- Sanusi, A. R., & Darmawan, C. (2016). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK DALAM MEMBENTUK KARAKTER KEPEMIMPINAN LINTAS BUDAYA PADA GENERASI MUDA DEMI MEWUJUDKAN BUDAYA POLITIK PANCASILA (Studi Deskriptif terhadap Organisasi Kepemudaan Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat). *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(1), 24. <https://doi.org/10.17509/jpis.v25i1.3668>
- Sukarno, B. (2011). Pendidikan Politik Dalam Demokratisasi. *Widya Wacana:*

Jurnal Ilmiah, 7(1), 1–19.

Sulisworo, D., Wahyuningsih, T., & Arif, D. B. (2016). Demokrasi (Bahan Ajar).
Demokrasi (Hibah Materi Pembelajaran Konvensional), 177–201.

Wawan Patriansyah, Nursiah Hasibuan, Muallim Hasibuan, & Tri Eva Juniasih.
(2024). Analisis Peran Pendidikan Politik Dalam Membangun Kesadaran
Mahasiswa Berpartisipasi Dalam Pemilu Tahun 2024. *Aliansi: Jurnal
Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 40–49.
<https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.56>

